

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku-Buku

- A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, alih bahasa M. Isa Arief, (Jakarta: Intermasa, 1986).
- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, (Bandung: UII Press, 2009).
- Abdul Wahab Afif, *Hukum Waris Islam*, (Serang: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati, 1984).
- Achmad Ali, *Keterpurtukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya)*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Al Shobuni, Muhammad Ali. *Al Mawaariitsu fii Al Syarii' Al Islamiyyah*. (Jakarta: Dar Al Kutub Al Islamiyyah, 2010).
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983).
- Anton M. Moelino, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2006).
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Penyusunan Kamus Hukum Umum Bahasa Belanda-Bahasa Indonesia*, (Jakarta: BPHN-Departemen Kehakiman dan HAM RI, 1997/1998).
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002).
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996).
- Efendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003).
- Engelbrecht, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI*, (Jakarta: Internusa, 1992).

- G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan V, (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 1999).
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2013).
- Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2009).
- Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2020).
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan Somardi, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007).
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary; Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, (St. Paul Minn: Revised Fourth Edision, West Publishing Company, 1968).
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).
- Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Kita-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijaksana Memahami Masalah Hukum Waris*, (Bandung: Kaifa, 2015).
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, 2003).
- J.G. Klassen dan J.E. Eggens, *Hukum Waris Bagian 1*, disadur dari buku *Huwelijks-Goederen en Erfrecht*, (Jakarta: Esa Study Club, 1979).
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Maria Sumardjono, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996).
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1976).
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembagunan Nasional*, (Bandung: Binacipta, 1975).
- Muhammad Adam, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, (Bandung: Sinar Baru, 1985).
- N.K. Denzim dan Y.S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, (Thousand Oaks: Sage Publications, 1994).
- Oemar Moechthar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017).
- Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris, Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Rajawali, 1982).
- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993).
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978).

- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Retnowulan Sutanto, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 1997).
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Ronny Hanitijo, *Kedudukan dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Autentik yang Mengandung Sengketa*, (Jakarta: Bina Cipta, 2011).
- S. Nasution, *Azaz-Azaz Kurikulum*, (Bandung: Penerbit Terate, 1964).
- Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1998).
- Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000).
- Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Bina Cipta, 1977).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- Sugiono, *Akta Autentik Notaris, Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*, (Bandung: Balei, 2008).
- Suseno, *Etika Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Tan Thong Kie, *Serba Serbi 30 Tahun Notariat di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1984).
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat (Serba-Serbi Praktek Notaris), Buku 1*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000).
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1991).
- Yamin Lubis dan Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Surat Keterangan Hak Waris Bagi Golongan Penduduk di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Golongan Ras dan Etnis.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

### 3. Jurnal

- Aden Ahmad, Sihabudin, dan Siti Hamidah, “Kepastian Hukum Surat Keterangan Waris Sebagai Persyaratan Pengambilan Jaminan Kredit”, *Jurnal Selat*, Volume 6, Nomor 1, 2018.
- Emi Latifah, “Precautionary Principle Sebagai Landasan Dalam Merumuskan Kebijakan Publik”, *Jurnal Yustisia*, Volume 5, Nomor 2, 2016.
- Ilyas, “Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Berdasarkan Hukum Islam”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13, Nomor 55, 2011.
- Johanes Ibrahim, P. Lindawaty S. Sewu, dan Hassanain Haykal, “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Konsistensi Penerbitan Kebijakan PPAP Sebagai Upaya Menciptakan Struktur Perbankan yang Sehat”, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Volume 4, Nomor 1, 2013.
- M. Idris Ramulyo, “Suatu Perbandingan Antara Ajaran Sjafi’i dan Wasiat Wajib di Mesir tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 12, Nomor 2, 1982.
- Sri Wartini, “Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam *Sanitary and Phytosanitary Agreement*, Studi Kasus: Keputusan *Appellate Body WTO* Dalam Kasus *Harmone Beef* Antara Uni Eropa dengan Amerika Serikat”, *Jurnal Hukum*, Volume 14, Nomor 2, 2007.
- Suharjono, “Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum”, *Varia Peradilan*, Volume 11, Nomor 123, 1995.
- Zefrizal Nurdin, “Dilema Pemanfaatan Tanah Ulayat Untuk Investasi di Sumatera Barat Pada Norma dan Implementasi”, *Jurnal Media Hukum*, Volume 22, Nomor 1, 2015.

### 4. Sumber lainnya

- Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember 2001.
- Erni Agustin, Oemar Moechthar, dan Danny Robertus Hidayat, *Kedudukan Anak Luar Kawin yang Diakui Dalam Masa Perkawinan Berdasarkan Pasal 285 Burgerlijk Wetboek, Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Laporan Penelitian RKAT FH UNAIR Tahun 2017, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2017).

<https://kbbi.web.id/hukum>.

<https://www.kbbi.web.id/autentik>.

Irma Devita, “Keterangan Waris”, <http://www.irmadevita.com/2012/keterangan-waris/>

Oemar Moechthar, *Kedudukan Negara Sebagai Pengelola Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Hukum Waris BW (Burgerlijk Wetboek)*, Tesis, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2012).

Tatiek Sri Djatmiati, *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Disertasi, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2002).

